



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

LAPORAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN AGAM
TAHUN 2025



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN AGAM TAHUN 2026

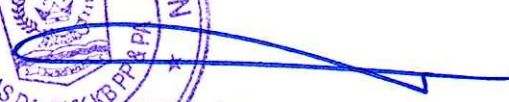
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025 Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam. Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Lubuk Basung , Januari 2026
KEPALA DINAS DALDUK KBPPPA
KABUPATEN AGAM

Drs. SURYA WENDRI
NIP. 19660716 199303 1 006
Pembina Utama Muda (IV/c)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta sebagai bagian dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025 secara umum dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan baik pada Indikator Kinerja Utama maupun pada indikator kinerja program, kegiatan ataupun Sub Kegiatan. Diantaranya adalah Persentase Penurunan Kasus kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan (TPPO) pada Perempuan, Kecamatan Layak Anak, Nagari Layak Anak, Sedangkan untuk capaian yang rendah adalah Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) dan juga merupakan capaian menurun dari tahun sebelumnya.

Dari sisi tata kelola, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025 terus memperkuat manajemen kinerja melalui perencanaan dan pelaporan yang lebih sistematis, meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait serta penguatan pemahaman aparatur terhadap prinsip SAKIP, meskipun nilai evaluasi SAKIP resmi Tahun 2025 masih menunggu hasil penilaian.

Keberhasilan tersebut didukung oleh kerjasama yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Agam untuk penanganan Kasus kekerasan baik

terhadap perempuan dan anak. Selain itu keberhasilan didukung dengan adanya Dana DAK Non Fisik BOKB, DAK Non Fisik PPPA serta anggaran Pokir Anggota DPRD Kab Agam juga adanya Penyuluh Keluarga Berencana yang tersebar di 16 Kecamatan se Kabupaten Agam sehingga koordinasi dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Lubuk Basung, Januari 2026

KEPALA DINAS DALDUK KBPPPA
KABUPATEN AGAM



Drs. SURYA WENDRI
NIP. 19660716 199303 1 006
Rebma Utama Muda (IV/c)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	01
A. Latar Belakang	01
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	02
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	06
D. Landasan Hukum.....	7
E. Sistematika.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
C. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
B. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS.....	xx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan

dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas,disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu:

- a. Kepala
- b. Sekretaris , membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan;
dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Pelaporan

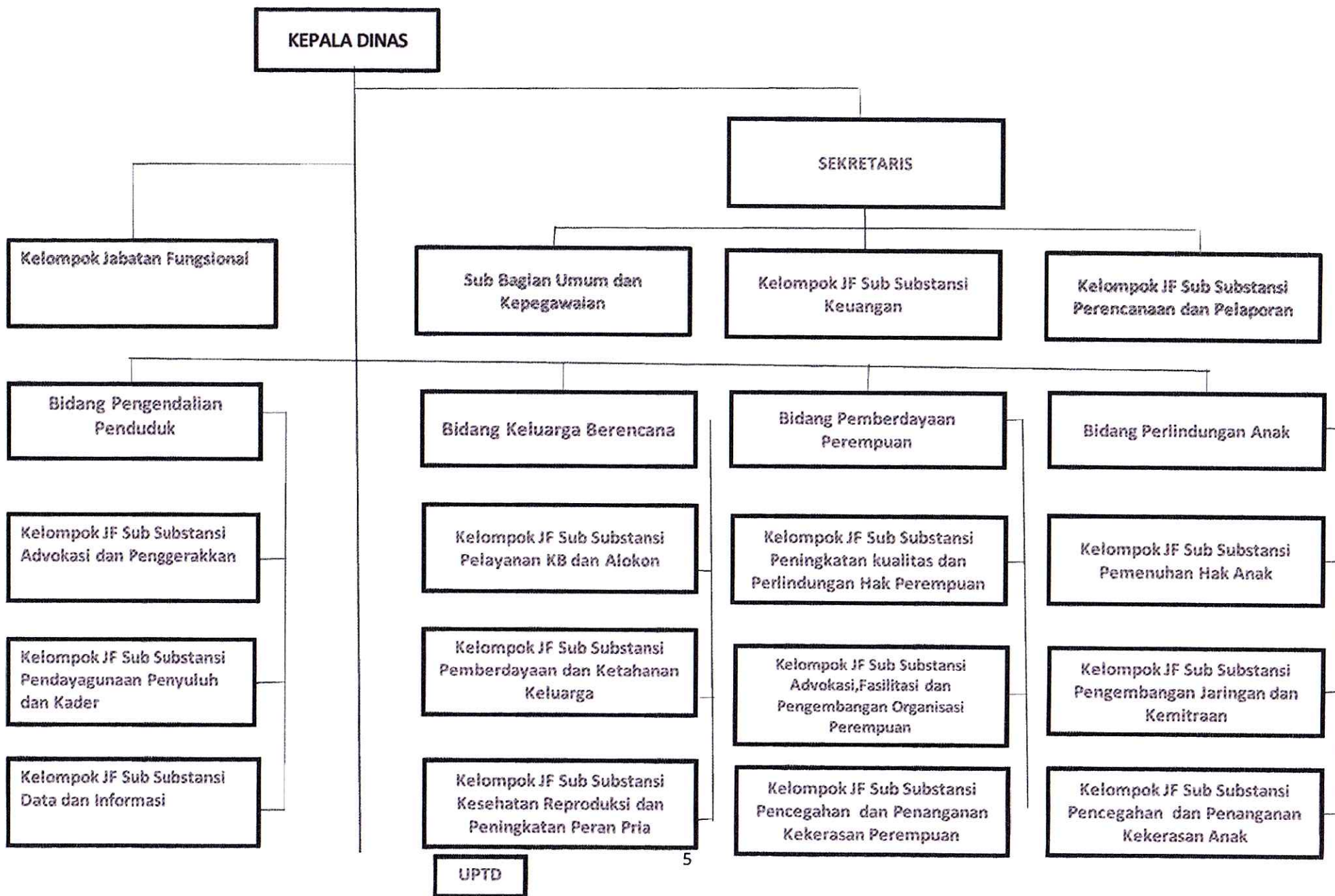
- c. Bidang Pengendalian Penduduk membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Advokasi dan Penggerakan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendayagunaan Penyuluh dan Kader
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Data dan Informasi
- d. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan KB dan Alokasi
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Reproduksi dan Peningkatan Peran Pria
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Hak Perempuan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Advokasi, Fasilitasi dan Pengembangan Organisasi Perempuan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan.
- f. Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemenuhan Hak Anak
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Jaringan dan Kemitraan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan keahlian Kelompok Jabatan yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati. Sebagai penyelenggara tugas pokok dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana diatas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh pejabat Struktural sesuai bidang teknis masing-masing dan di lapangan di bantu oleh pejabat-pejabat fungsional yang bertugas di masing-masing kecamatan sebagai Penyuluh Keluarga Berencana.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB,
2. Tingginya angka pernikahan usia muda,
3. kurangnya pemahaman tentang tumbuh kembang anak, serta berbagai tantangan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Perkawinan Anak, Masih tingginya tingkat perkawinan anak di Kabupaten Agam, sehingga melanggar hak anak untuk pendidikan (belajar), kesehatan (reproduksi) dan perkembangan yang optimal.
5. Tantangan di Era Digital adanya Eksploitasi digital dan penyalahgunaan media sosial oleh anak, termasuk penyebaran informasi yang tidak layak anak di media sosial.
6. Pergaulan Penyalahgunaan Narkoba dan Minuman Keras, Anak-anak sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan minuman keras

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam periode 2025 – 2029 , Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk belajar dan berusaha serta rendahnya akses terhadap sumberdaya ekonomi, politik, teknologi informasi dan pasar modal.
2. Rendahnya partisipasi, akses dan kontrol yang dimiliki perempuan dalam pembangunan, ditandai dengan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang terjadi di rumah tangga dan lingkungannya.
4. Tingginya TFR
5. Tingginya Un-met Need
6. Masih rendah pencapaian peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/ IUD,Implant,MOW,MOP)
7. Percepatan penurunan stunting.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 ;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja awal dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis periode 2021-2026 dan 2025-2029

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam.

Pada tahun 2025 terjadi transisi pada RPJMD Kabupaten Agam (RPJMD tahun 2021-2026 menjadi RPJMD tahun 2025-2029) sehingga terjadi pula perubahan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam yaitu Renstra 2021 -2026 dan Rentra 2025-2029 yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Perubahan tersebut karena adanya pergantian pimpinan. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Agam tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025-2029

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025- 2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) 2025 Kabupaten Agam yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam mengacu pada Misi ke-3, yaitu :

“Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing. “

2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
- b. Meningkatkan Perlindungan Anak
- c. Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah

1. Terkendalinya Laju pertumbuhan penduduk

Sasaran yang akan dicapai pada Tujuan kedua adalah :

- a. Menurunnya Unmet Need
- b. Meningkatkan Ketahanan Keluarga.

Adapun target yang telah ditetapkan selama jangka waktu 5 tahun adalah sebagaimana tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan	1 Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan	Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,06	64,46	65,86	67,26	70,06	71,46

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Masyarakat	perempuan							
			Persentase Penurunan Kasus Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan (TPPO) pada Perempuan	85	85	95	100	100	100
		2	Meningkatkan Perlindungan Anak Anak						
			Kecamatan Layak Anak	0	0	2	4	5	6
			Nagari Layak nak	0	3	10	15	21	27
		3	Meningkat nya tata kelola organisasi Perangkat Daerah						
			Nilai RB perangkat Daerah berdasarkan PMPRB	28,49	28,55	29	29,50	30	31
2	Terkendali nya Laju pertumbuhan penduduk	4	Menurunkan Unmet Need						
			Angka Prevelensi kontrasepsi modern (mCPR)	66,32 persen	67,5 persen	68 persen	68,5 persen	69 persen	69,65 persen
		5	Meningkatkan Ketahanan Keluarga						
			Indeks Pembangunan keluarga (iBangga)	50.3	50.3	50,5	50,7	50,9	51,2

Sumber : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam periode (2021-2026)

3. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam adalah :

Tujuan ***Meningkat nya kesetaraan gender, perlindungan anak dan terwujudnya keluarga yang berkualitas*** dengan indikator :

- a. Indeks Ketimbangan Gender (IKG)
- b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- c. Indkes Pembagunan Keluarga (iBangga)

Sasaran Kinerja adalah :

- a. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b. Meningkatnya Perlindungan Anak dengan indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)
- c. Meningkatnya Kualitas Keluarga dengan indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)
- d. Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah dengan indikator Nilai SAKIP

Adapun target yang telah ditetapkan selama jangka waktu 5 tahun adalah sebagaimana tabel 2.2. dibawah ini :

Tabel 2.2

Tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan terwujudnya keluarga yang berkualitas		Indeks Ketimbangan Gender (IKG)	0,325	0,298	0,273	0,250	0,229	0,215
2			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,54	64,29	65,04	65,79	66,54	67,29
3			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	60,7	62,1	63,3	64,5	65,7	66,8
4		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,17	97,25	97,33	97,41	97,49	97,57
5		Meningkatnya Perlindungan Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	793,3 (Nindya)	795 (Nindya)	797,5 (Nindya)	800 (Nindya)	801 (Utama)	805 (Utama)
6		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,27	2,39	2,36	2,34	2,32	2,30
7		Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP	78,02	81	81,5	81,75	81,75	81,75

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Kabupaten Agam Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2025-2029 dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	68,66
		Persentase Penurunan Kasus Kekerasan dan TPPO pada	Persentase	100

		perempuan		
2.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Kecamatan Layak Anak	Kecamatan	1
		Nagari Layak Anak	Nagari	10
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	Persen	80
4.	Menurunkan Unmet Need	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)	Persen	68,5 %
5.	Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Indeks Pembangunan keluarga (iBangga)	Persen	60 %

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	97.17
3.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Persen	793,3 (Nindya)
4.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	4.2
5.	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Persen	78.02

C. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung capaian kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu adanya Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang selaku PPTK dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtasi pada masing-masing bidang. Pada program, kegiatan dan sub kegiatan ada indikator

kinerja yang ditargetkan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	16,02 Persen	358.528.000.
1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen GAP dan GAB	55 OPD	18.950.000.
1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	60 Orang	18.950.000
1.2	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	39.578.000.
1.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	1 Organisasi	39.578.000.
1.3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	19 Organisasi	300,000,000
1.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	105 orang	300,000,000

2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 persen	76,401,451
2.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	50,000,000
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000.
2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan kab/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi kasus perempuan	3 layanan	26.401.451
2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	26.401.451.
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pemenuhan pilar-pilar kualitas keluarga.	83,3 persen	150.000.000.
3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	2 Kegiatan	150.000.000
3.1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000.
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penyajian Data Gender dan Anak	100 persen	14.324.000
4.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Buku Data Gender dan anak yang dicetak	20 buku	14.324.000

4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten /Kota yang Tersedia	1 dokumen	14.324.000
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	80 Persen	130,484,000
5.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Layak Anak	65 Persen	130,484,000
5.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	10 Organisasi	130,484,000
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 persen	351,341,199
6.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Bimtek	200 Orang	51.500.000
6.1.1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA	120 Orang	51.500.000
6.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah AMPK Penerima Layanan	50 Orang	230,821,199
6.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	27.082.650..
6.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	50 Layanan	203.738.549.

6.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPTD PPA	1 lembaga	69.020.000,
6.3.1	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMP"	70 Orang	69.020.000,
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	95 Persen	4.641.304.673.
7.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.934.510.725
7.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	3.865.580.725.
7.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	68.930.000.
7.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penunjang Kebutuhan Administrasi Umum	100 persen	157.854.619
7.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,697,600
7.2.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	43,744,609
7.2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4,050,000.
7.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	100.362.410.

7.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 Persen	59.214.500.
7.3.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	19.189.500.
7.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	40.025.000
7.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan PD	100 Persen	357.175.000.
7.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119.719.000
7.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	237.456.000.
7.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpeliharanya barang milik daerah	100 Persen	132.549.829
7.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19.115.000
7.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	90.274.000.
7.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	8.674.869.
7.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnyag dipelihara/ direhab	2 Unit	14.486.000.
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka prevalensi Kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	69,65 persen	297,435,000
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang mendukung Kebijakan kependudukan	27 OPD	55,635,000

	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	16 Satuan Pendidikan	55,635,000
8.1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang di Mutakhirkan	50000 KK	241.800.000
8.1.1	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	16 Laporan	88.200.000.
8.1.2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	153.600.000.
9.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(unmet need) (%)	12,5 persen	6.605.260.088
9.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru	6000 Orang	1,376,716,088
9.1.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	79.906.088.
9.1.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan	722.720.000
9.1.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	16 Laporan	320,000,000
9.1.4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	1 Dokumen	67.750.000

		Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan elektronik serta Media Luar Ruang		
9.1.5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga,	35 organisasi	186.340.000.
9.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yg dibina	25 Orang	582,000,000
9.2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1251 orang	582.000.000
9.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akseptor yang dilayani	7000 Orang	4.242.984.000
9.3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	24,300,000
9.3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2000 orang	899.762.000
9.3.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	92 Unit	3.294.172.000
9.3.4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 laporan	24.750.000
9.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Renja Pokja Kampung KB	76 Dokumen	403.560.000

9.4.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yg Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	76 Kampung KB	403.560.000
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (iBangga) (%)	56,112 persen	2.583.991.685.
10.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB,BKR,BKL ,PIK R dan UPPKS	50 Kelompok	105.200.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,Kelanjut usiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	40.200.000
10.1.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Unit	65,000,000
10.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan yang dibina	50 Kelompok	2,478,791,685
10.2.1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/ kelahiran, Baduta/Balita	10 Laporan	1.113.000.000.
10.2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil,Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil,Pascasalin/ kelahiran,Baduta/Balita) yg mendapat pendampingan	10 Laporan	1,365,791,685

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024(setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan

capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Rentra
Tahun 2021-2026

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Sasaran.1. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	68,66				Kementrian PPPA (belum dirilis oleh kementrian)
		Persentase Penurunan Kasus kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan (TPPO) pada Perempuan	100	100	100%	Sangat Tinggi	
	Sasaran.2. Meningkatkan Perlindungan Anak	Kecamatan Layak Anak	1	1	100%	Sangat Tinggi	
		Nagari Layak Anak	10	11	110%	Sangat Tinggi	
	Sasaran.3. Meningkat nya tata kelola organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80	n/a			
	Sasaran 1. Menurunkan Unmet Need	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	68,5 %	59,3	86,56	Tinggi	
	Sasaran 2. Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Indeks Pembanguna Keluarga (I Bangga)	60 %	68,7	114,5	Sangat Tinggi	Dari Kementrian Kemenduk/BKKBN

Capaian IKU renstra 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut

1. Capaian sasaran 1 indikator IDG belum ada karena belum dirilis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator pembangunan yang digunakan untuk menilai tingkat peran aktif dan kekuasaan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dibandingkan laki-laki.

IDG tidak mengukur kesejahteraan dasar, **tetapi** pemberdayaan dan posisi strategis perempuan terdiri dari 3 komponen utama :

- a. Keterwakilan perempuan di parlemen
 - b. Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, dan teknisi.
 - c. Sumbangan pendapatan perempuan
2. Persentase Penurunan Kasus kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan (TPPO) pada Perempuan, Indikator ini digunakan untuk **mengukur keberhasilan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan serta TPPO terhadap perempuan** dalam periode waktu tertentu (biasanya tahunan).

Rumus =

Persentase Penurunan (%) = $\frac{\text{Jumlah kasus tahun sebelumnya} - \text{Jumlah Kasus tahun berjalan}}{\text{Jumlah kasus tahun sebelumnya}} \times 100\%$

3. Kecamatan Layak anak

Capaian kecamatan layak anak 100 % dinilai dari hasil penilaian nagari yang ada di kecamatan

4. Nagari Layak Anak

Capaian Nagari Layak Anak 110 % dinilai dari penilaian mandiri, verifikasi administrasi dan validasi tim penilai

5. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Nilai Sakip PD adalah skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menunjukkan seberapa baik kinerja dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah. Untuk nilai SAKIP tahun 2025 Dinas Dalduk KBPPPA belum keluar dan untuk capaian tahun 2024 78,02 (BB)

6. Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)

Capaian Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR) tahun 2025 adalah 59,3 dikeluarkan oleh Kementrian Kependudukan Keluarga Berencana / BKKBN

Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR) adalah persentase perempuan usia subur (15–49 tahun) yang sedang menikah atau hidup bersama pasangan, yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern pada saat survei dilakukan

Cara perhitungan Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR) = Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi modern dibagi dengan Jumlah total PUS X 100%

7. Indeks Pembanguna Keluarga (I Bangga)

Capaian Indeks Pembanguna Keluarga (I Bangga) tahun 2025 adalah 68,7 dikeluarkan oleh Kementrian Kependudukan Keluarga Berencana / BKKBN

Hasil perhitungan iBangga dengan skala 0-100 akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori status pembangunan keluarga: Rentan (di bawah 40), Berkembang (40-70), dan Tangguh (di atas 70).

iBangga mencakup tiga dimensi utama yang diukur melalui berbagai variabel, yaitu:

1. **Ketentraman:** Meliputi aspek kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga.

2. Kemandirian: Mengukur pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses media online.

3. Kebahagiaan: Dinilai dari interaksi keluarga dan interaksi sosial.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Rentra 2025-2029

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Sasaran.1. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indek Pembangunan Gender (IPG)	97,17				Dari Kementrian PPPA untuk tahun 2025. belum diliris kemnetrian
	Meningkatnya Perlindungan Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	79,33	79,33	100%	Sangat Tinggi	Dari Kementrian PPPA
	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Angka Kelahiran Total (TFR)	4,2	2,41	57.38		Dari Kemenduk/B KKBN
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP PD	78.02				

Berdasarkan tabel capaian IKU ke dua diatas dapat disimpulkan bahwa : secara kinerja sudah tercapai namun ada beberapa indikator yang belum ada capaian datanya, karena data tersebut dikeluarkan oleh Kementrian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Kependudukan Keluarga Berencana /BKKBN .

Pada Tahun 2025 terjadi perubahan Perjanjian Kinerja (PK) hal ini disebabkan telah terbitnya RPJMD Tahun 2025- 2029, sehingga terjadi perubahan target sasaran yang ada pada RPJMD dan juga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam.

Faktor Pendorong adalah :

1. Adanya Kerjasama antar Organisasi Pemerintah Daerah
2. Adanya Dukungan dana DAK Fisik ,Non Fisik BOKB dan Non Fisik PPA
3. Adanya Kesadaran Masyarakat untuk peduli terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Dalduk KBPPPA terutama pada

Capaian IKU renstra tahun 2026-2029 ada beberapa indikator kinerja antara lain :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah : indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. IPG menunjukkan sejauh mana perempuan menikmati hasil pembangunan dibandingkan laki-laki dalam tiga dimensi utama: **kesehatan, pendidikan, dan ekonomi** Cara penghitungan adalah $IPG = IPM \text{ Perempuan} / IPM \text{ Laki-laki}$ Capaian IPG tahun 2025 Kabupaten Agam belum dirilis oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Kabupaten Layak Anak adalah : sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

KLA bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. KLA dinilai dengan sistem

indikator resmi dari Kementerian PPPA dimana penilaian berbasis pemenuhan indikator.

Indikator Penilaian (5 Klaster Hak Anak) :

Sebuah kabupaten atau kota dinilai berdasarkan **24 indikator** yang dikelompokkan ke dalam 5 klaster Utama :

- Hak Sipil dan Kebebasan: Hak atas nama, akta kelahiran, identitas, dan kebebasan berekspresi.
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif: Kualitas pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan dari kekerasan dalam keluarga.
- Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan: Akses kesehatan, sanitasi, air bersih, gizi, dan kesejahteraan.
- Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya: Akses pendidikan, pengembangan bakat, rekreasi, dan kegiatan seni budaya.
- Perlindungan Khusus: Perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas, anak jalanan, korban kekerasan, dan anak dalam situasi darurat.

Pencapaian KLA pada tahun 2025, Kabupaten Agam Kategori Nindya (79,33)

Upaya Kabupaten Agam untuk mencapai Kabupaten Layak Anak (KLA)

1. Melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten
2. Melakukan Sosialisasi, Advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak
3. Mengumpulkan data dasar pengembangan Kabupaten Layak Anak
4. Menganalisis kebutuhan yang bersumber dari Data dasar

5. Melakukan Desiminasi data Dasar
6. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak,yang disesuaikan dengan potensi daerah
7. Menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan Mekanisme kerja
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak
9. Membuat Laporan kepada Bupati Agam setiap tahun

Penghitungan KLA oleh Kementrian PPPA Cara menghitung skor KLA Kategori KLA berdasarkan total nilai adalah :

- Pratama
- Madya
- Nindya
- Utama
- Paripurna

3. Angka Kelahiran Total Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun), dengan asumsi bahwa wanita tersebut mengalami tingkat fertilitas (kelahiran) yang berlaku pada tahun tertentu dan tidak mengalami kematian selama usia subur. Hasil TFR Kabupaten Agam dihitung oleh Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dan untuk tahun 2025 dengan capaian 2,41 meningkat dari tahun 2024 yaitu 2,44.

Cara mencari TFR adalah : $TFR = \sum ASFR \times 5$

Dimana **TFR** = Total Fertility Rate

ASFR = Age-Specific Fertility Rate atau **Angka Kelahiran Menurut Kelompok**

Umur (biasanya per 5 tahun kelompok umur: 15–19, 20–24, ..., 45–49)

Angka **5** adalah selang usia dalam tahun untuk masing-masing kelompok umur

4. Nilai Sakip PD adalah skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menunjukkan seberapa baik kinerja dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah.

Untuk nilai SAKIP tahun 2025 Dinas Dalduk KBPPPA belum keluar dan untuk capaian tahun 2024 78,02 (BB)

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	68,66 %	63,63	92,67	68,66	n/a	
		Persentase Penurunan Kasus Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan (TPPO) pada Perempuan	95 %	100	105,26	100	100	100
2	Meningkatkan Perlindungan Anak	Kecamatan Layak Anak	1	1	100	1	1	100
		Nagari Layak Anak	8	8	100	10	11	110
3	Meningkat nya tata kelola organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80	78,02	97,52	80	n/a	
4	Menurunkan Unmet Need	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	68,5 %	57.10	83.36	68,5 %	59,3	86,56
5	Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Indeks Pembanguna Keluarga(iBangga)	50,9 %	59.36	118.50	60	68,7	114,5

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Agam periode 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan capaian kinerja dengan target sasaran strategis Akhir Periode

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7= 5/6*100
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	63,63	n/a	71.46	
		Persentase Penurunan Kasus Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan (TPPO) pada Perempuan	100	100	100	100
2	Meningkatkan Perlindungan Anak	Kecamatan Layak Anak	1	1	6	16.66
		Nagari Layak nak	8	11	27	40.74
3	Meningkat nya tata kelola organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78,20	n/a	80	
4	Menurunkan Unmet Need	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	57,10	59,3	69,5	85.32
5	Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (i Bangsa)	59,36	68,7	51,2	134.17

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian dengan Capaian Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a		
		Persentase Penurunan Kasus Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan (TPPO) pada Perempuan	100		
2	Meningkatkan Perlindungan Anak	Kecamatan Layak Anak	1		
		Nagari Layak Anak	11		
3	Meningkat nya tata kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip PD			
4	Menurunkan Unmet Need	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	59,3	60,8	97,53
5	Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Indeks Pembanguna Keluarga (i Bangsa)	68,7	67,3	102,08

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.5

Analisis program dan kegiatan terhadap Capaian Kinerja

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja	% Capaian	Program Kegiatan	Indikator kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36.10	
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pemenuhan pilarpilar kualitas keluarga.	n/a	
				Program Pengelolaan Sistem Data gender dan Anak	Persentase Penyajian Data Gender dan Anak	100	Menunjang
		Persentase Penurunan Kasus Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan (TPPO) pada Perempuan	100	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Menunjang
	Meningkatkan Perlindungan Anak	Kecamatan Layak Anak	100	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	n/a	
		Nagari Layak Anak	110	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan	100	Menunjang

					layanan komprehensif		
Meningkatnya tata kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip PD	n/a	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	100	Menunjang	
Menurunkan Unmet Need	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	71,15	Program Pengendalian Penduduk	Angka prevalensi Kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	86,56	Tidak Menunjang	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(unmet need) (%)	95,68	Menunjang	
Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	n/a	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga (KS)	Indeks pembangunan keluarga (iBangga) (%)	114,5	Menunjang	

6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Rencana Tindak lanjut
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	capaian 2025 belum dirilis oleh oleh Kementrian PP PA	Diusahakan untuk memantau sampai ada data dari kementrian PPPA
		Persentase Penurunan Kasus Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan (TPPO) pada Perempuan	100 %	Capaian Indikator ini karena semua yang melapor langsung di tindak lanjuti dan diberikan pendampingan terhadap Kasus kekerasan terhadap perempuan	
2	Meningkatkan Perlindungan Anak	Kecamatan Layak Anak	100 %	Tercapainya indikator ini karena - Adanya komitmen kelembagaan dan Kebijakan dari regulasi ,anggaran dan program - adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha. - adanya peran Forum Anak - adanya sarana dan fasilitas ramah anak	
		Nagari Layak anak	110 %	Tercapainya indikator ini karena - Adanya komitmen kelembagaan dan Kebijakan dari regulasi ,anggaran dan program - adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha. - adanya peran Forum Anak - adanya sarana dan fasilitas ramah anak	
3	Meningkat nya tata kelola organisasi Perangkat	Nilai Sakip PD	n/a		

	Daerah				
4	Menurunkan Unmet Need	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	86,56	Capaian Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR) rendah disebabkan karena: Adanya DO pemakaian Alokon MKJP, masih minimnya peserta KB Pria.	Meningkatkan KIE melalui penyuluhan oleh PKB, Kader PPKBD dan Sub PPKBD. Meningkatkan pelayanan MKJP.
5	Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Indeks Pembangua Keluarga (i Bangsa)	114,5		

B. REALISASI ANGGARAN

Analisis atas efisiensi penggunaan Anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
				Rp.	
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	4,641,304,673	4,322,783,286	93.1
1		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,934,510,725	3,676,795,377	94.15
1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,865,580,725	3,611,397,377	93.42
2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	68,930,000	65,398,000	94.88
2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	157,854,619	157,480,701	99.76
1		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,697,600	9,697,000	99.99
2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,744,609	43,413,526	99.24

3		Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakkan dan pengadaan	4,050,000	4,050,000	100.00
4		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,362,410	100,320,175	99.96
3		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59,214,500	58,695,810	99.12
5		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	19,189,500	18,880,000	98.39
6		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,025,000	39,815,810	99.48
4		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	357,175,000	303,398,949	84.94
9		Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik	119,719,000	86,662,949	72.39
10		Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	237,456,000	216,736,000	91.27
5		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132,549,829	126,412,449	95.37
11		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19,115,000	19,032,129	99.57
12		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	90,274,000	84,758,950	93.89
13		Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8,674,829	8,650,000	99.71
14		Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14,486,000	13,971,370	96.45
II	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	358,528,000	293,988,980	82.00
6		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	18,950,000	13,913,000	73.42

15		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	18,950,000	13,913,000	73.42
7		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	39,578,000	38,031,000	96.09
16		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	39,578,000	38,031,000	96.09
8		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300,000,000	242,044,980	80.68
17		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300,000,000	242,044,980	80.68
III		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	76,401,451	73,937,100	96.77
9		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	47,813,400	95.63
18		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	47,813,400	95.63
10		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	26,401,451	26,123,700	98.95
19		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	26,401,451	26,123,700	98.95
IV		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	150,000,000	147,448,522	98.30

11		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	147,448,522	98.30
20		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	147,448,522	98.30
		Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	14,324,000	13,809,900	96.41
12		Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14,324,000	13,809,900	96.41
21		Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	14,324,000	13,809,900	96.41
V	Meningkatkan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	130,484,000	128,441,000	98.43
13		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	130,484,000	128,441,000	98.43
22		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	130,484,000	128,441,000	98.43
VI		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	351,341,199	350,685,325	99.81
14		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51,500,000	51,362,100	99.73
23		Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	51,500,000	51,362,100	99.73

15		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230,821,199	230,525,825	99.87
24		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27,082,650	26,901,255	99.33
25		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	203,738,549	203,624,570	99.94
16		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69,020,000	68,797,400	99.68
26		Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	69,020,000	68,797,400	99.68
VII	Menurunkan Unmet Need	PROGRAM PENDALIAN PENDUDUK	297,435,000	269,377,110	90.57
17		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	55,635,000	49,970,000	89.82
27		Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur informal dan formal	55,635,000	49,970,000	89.82
18		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	241,800,000	219,407,110	90.74
28		Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	88,200,000	87,600,000	99.32
29		Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	153,600,000	131,807,110	85.81

VIII		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	6,605,260,088	4,492,159,776	68.01
19		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,376,716,088	1,185,676,280	86.12
30		Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	79,906,088	77,572,100	97.08
31		Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	722,720,000	685,282,550	94.82
32		Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	320,000,000	300,087,500	93.78
33		Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	67,750,000	67,746,980	100.00
34		Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	186,340,000	54,987,150	29.51
20		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	582,000,000	581,800,000	99.97
35		Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	582,000,000	581,800,000	99.97
21		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	4,242,984,000	2,409,238,496	56.78
36		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke faskes termasuk jaringan dan jejering	24,300,000	12,414,050	51.09
37		Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	899,762,000	788,411,700	87.62

38		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	3,294,172,000	1,596,662,746	48.47
39		Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24,750,000	11,750,000	47.47
22		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	403,560,000	315,445,000	78.17
40		Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	403,560,000	315,445,000	78.17
X	Meningkatkan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,583,991,685	2,556,541,230	98.94
23		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	105,200,000	79,732,000	75.79
41		Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	40,200,000	22,270,000	55.40
42		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	65,000,000	57,462,000	88.40
24		Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2,478,791,685	2,476,809,230	99.92

43	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	1,113,000,000	1,111,500,000	99.87
44	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	1,365,791,685	1,365,309,230	99.96
JUMLAH		15,209,070,096	12,649,172,229	83.17

Tabel. 3.8.
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Tujuan /Sasaran	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan		93.37	
2.	Meningkatkan Perlindungan Anak	105	99.17	Efisien
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah	n/a	93.10	
4.	Menurunkan Unmet Need	86,56	79.29	Efisien
5.	Meningkatkan Ketahanan Keluarga	114,5	98.94	Efisien

Capaian kinerja dan capaian anggaran pada tabel diatas dikatakan selaras atau seimbang dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam menetapkan sebanyak 1 tujuan, 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 3 Sasaran dan 5 indikator kinerja dengan :

- a. Indikator IDG Capaian kinerja
- b. indikator Persentase Penurunan kasus Kekerasan dan TPPO pada perempuan capaian kinerja 100 %
- c. Kecamatan Layak Anak capaian) 100% capaian paling rendah
- d. Nagari Layak Anak capaian 110 %
- e. Nilai RB Perangkat daerah capaian kinerja 97,75 %
- Tujuan 2 terdiri dari 2 Sasaran dan 2 Indikator kinerja dengan capaian kinerja
 - a. Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR) capaian 71,15 %
 - b. Indeks Pembanguna Keluarga (i Bangsa) sebesar

Sedangkan indikator sangat rendah pada Tujuan 2 ada pada sasaran 4 yaitu Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR) 71,15 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam ,dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN (DAK Fisik dan DAK Non Fisik /BOKB serta DAK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.209.070.096. sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.649.172.229. dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 83,17 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 16.83 %

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam dan pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Agam.

Lubuk Basung, Januari 2026

Kepala Dinas Dalduk KBPPPA
Kabupaten Agam



Drs. SURYA WENDRI
NIP. 19660716 199303 1 006
Pembina Utama Muda (IV/c)



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.SURYA WENDRI
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BENNI WARLIS
Jabatan : Bupati Agam

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Basung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua


BENNI WARLIS



Drs.SURYA WENDRI
NIP. 19660716 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indek Pembangunan Gender (IPG)	97.17 %
2	Meningkatnya Perlindungan Anak	Kabupaten Layak Anak	793,3 (Nindiya)
3	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Angka Kelahiran Total (TFR)	4,2
4	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP	78,02


Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 358.528.000.	APBDP
2. Perlindungan Perempuan	Rp. 76.401.451.	APBDP
3. Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 150.000.000.	APBDP
4. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 14.324.000.	APBDP
5. Pemenuhan Hak anak	Rp. 130.484.000.	APBDP
6. Perlindungan Khusus Anak	Rp. 351.341.199.	APBDP
7. Pengendalian Penduduk	Rp. 297.435.000.	APBDP
8. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.605.260.088.	APBDP
9. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.583.991.685.	APBDP
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 4.641.304.673.	APBDP
Jumlah Anggaran	Rp. 15.209.070.096.	

Lubuk Basung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
 BUPATI AGAM,


 BENNI WARLIS

Pihak Pertama
 KEPALA DINAS,


 Drs. SURYA WENDRI
 NIP. 19660716 199303 1 006